

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstruksi ialah serangkaian perubahan dimana sedang berjalan dengan berkelanjutan bagi beragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, SDM, SDA, serta industri. Fokus utama dari proses ini dimaksudkan untuk menghasilkan keadaan masyarakat dan keuangan yang lebih efisien serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di berbagai negara, baik yang masih tergolong miskin, sedang berkembang, maupun yang telah maju, kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Masalah ini memberikan pengaruh besar terhadap laju perkembangan ekonomi dan menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah. Umumnya, negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi harus mengalokasikan anggaran pembangunan ekonomi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Kemiskinan sendiri merujuk pada kondisi di mana sekelompok masyarakat hidup di bawah standar kelayakan, dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan, dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku di negaranya.

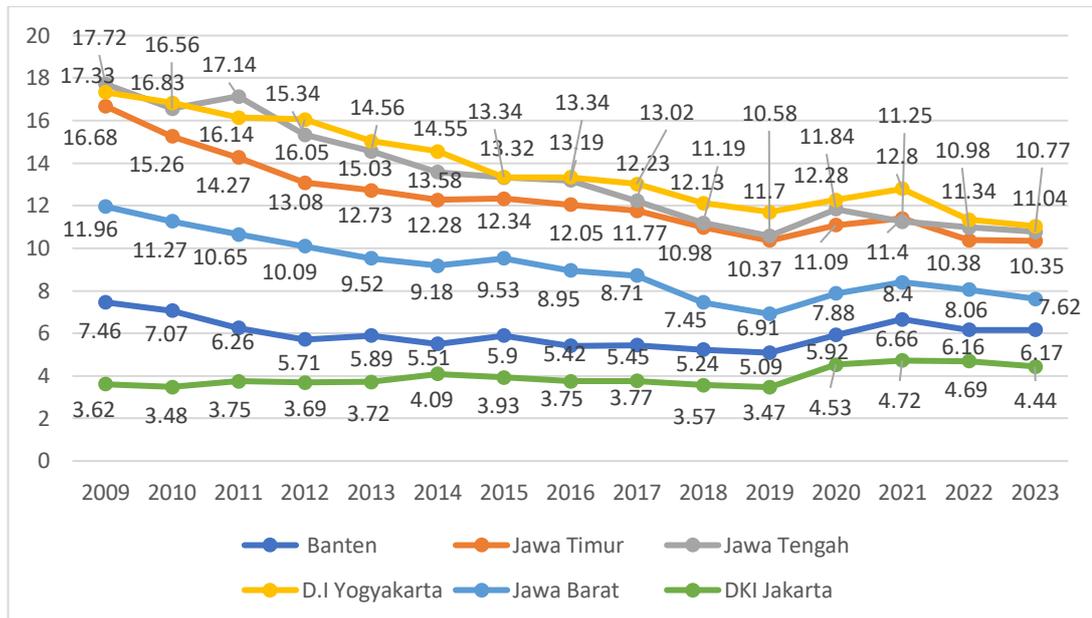
Masalah kemiskinan tidak dapat dipandang secara sederhana karena melibatkan berbagai aspek yang saling memengaruhi. Mayoritas negara internasional, terutama negara-negara dengan ekonomi menengah ke bawah contohnya Indonesia, masih bergelut melibatkan tantangan ini. Upaya menanggulangi kemiskinan menjadi bagian penting dari tujuan pembangunan, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selama ini, telah banyak teori dikembangkan dan kebijakan dijalankan untuk menangani permasalahan

tersebut. Namun demikian, pencapaian yang diraih belum sepenuhnya sesuai harapan (Arifin, 2020). Kondisi ini tidak hanya terlihat pada skala nasional, melainkan juga dirasakan secara merata di berbagai daerah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran agar penanganan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Wilayah Banten teridentifikasi sebagai salah satu provinsi di Indonesia sebagaimana masih mengalami tantangan keterbatasan ekonomi yang tinggi. Dari tahun 2009 hingga 2023, proporsi kemiskinan di provinsi ini berfluktuasi dalam total ataupun persentase. Beberapa periode menunjukkan kenaikan angka kemiskinan, seperti pada Maret 2015, September 2017, dan September 2018. Lonjakan ini bermula dari lonjakan harga sembako akibat kenaikan tarif BBM. Selain itu, rentang waktu September 2020 hingga Maret 2021 juga mencatat peningkatan, yang sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Namun, pada Maret 2023, angka kemiskinan di Provinsi Banten menunjukkan tren penurunan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Periode pandemi Covid-19 memberi dampak besar, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengurangi pendapatan. Ini menjelaskan peningkatan angka kemiskinan dari September 2020 hingga Maret 2021. Namun, tren penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 memberikan harapan. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh upaya pemulihan ekonomi, program bantuan sosial, dan peningkatan lapangan kerja. Baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, penurunan ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang dapat membantu masyarakat keluar dari siklus kemiskinan.

Gambar 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2009-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan **Gambar 1.1** sebagaimana menggambarkan rasio masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah administratif di Pulau Jawa selama periode 2009 hingga 2023, Provinsi Banten menempati peringkat kelima di antara provinsi yang lain. Di tahun 2009, peningkatan kemiskinan di Banten tercatat sebesar 7,46%, lalu mengalami penurunan sedikit menjadi 5,09% pada tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat Banten selama satu dekade. Sementara itu, di tahun 2020 persentase jumlah warga kurang mampu meningkat menjadi 5,92%, yang kemungkinan sangat terpengaruh oleh efek masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelambatan keuangan dan pertumbuhan jumlah masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Meskipun demikian, kondisi ini perlahan membaik pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka kemiskinan sedikit berkembang menjadi 6,66% pada tahun 2021, sebelum kembali turun menjadi 6,17% pada tahun 2023.

Wilayah Banten ialah salah satu wilayah yang berlokasi pada wilayah barat kepulauan terbesar di Indonesia. Secara geografis, provinsi ini memiliki batas wilayah langsung terhadap DKI Jakarta dan Jawa Barat di sisi timur laut Jawa yang berada di utara, sebelah selatan berdekatan dengan Samudera Hindia, serta sebelah barat dihubungkan oleh Terusan Sunda. Luas areanya mencapai sekitar 9.662,92 km². Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Banten memiliki beragam komponen ekonomi, terutama di bidang industri, perdagangan, pertanian, serta pariwisata.

Peningkatan kualitas hidup serta kemakmuran rakyat menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah nasional dan lokal, termasuk pemerintah Provinsi Banten. Sebagai kebijakan awal dalam memulai tahapan pembangunan, penting untuk menyusun strategi pembangunan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Rencana ini disusun untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan serta untuk mempermudah pelaksanaan yang dapat mengurangi berbagai hambatan.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten berada pada level yang lebih rendah dibanding provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa terutama karena peran kuat sektor industri dan jasa. Meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, angka tersebut mulai menunjukkan penurunan setelah tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi salah satu tantangan utama, sehingga penting untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah yang lebih merata demi tercapainya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

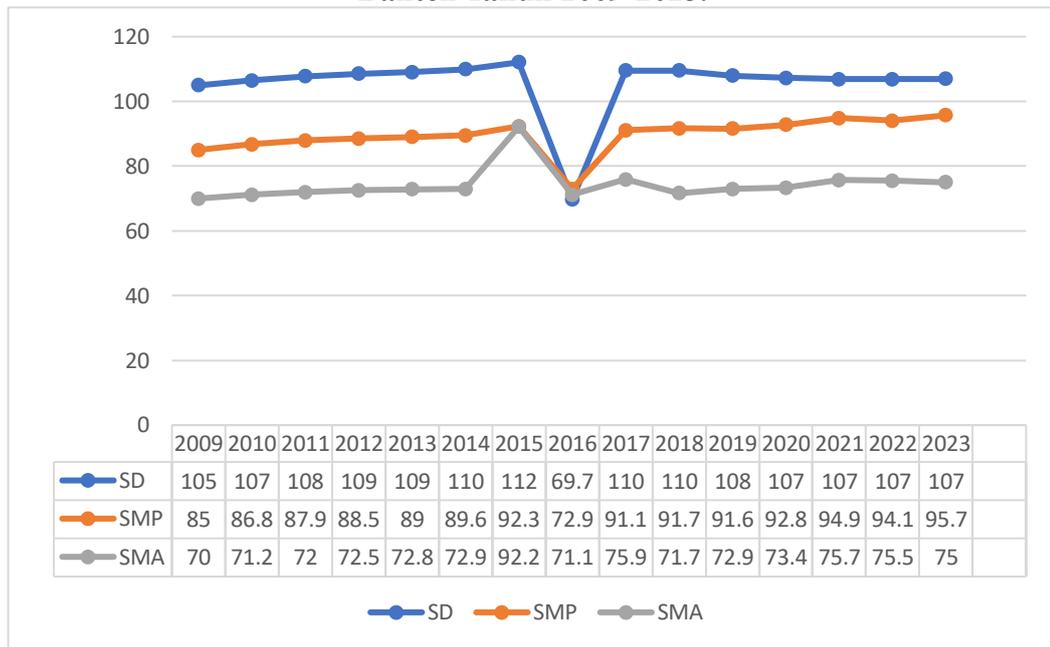
Kualitas pendidikan yang baik berpotensi menghasilkan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk berusaha mengungguli di pasar

kerja, sehingga semakin meningkat kualifikasi pendidikan, semakin besar kemungkinan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sedangkan, individu sebagaimana mempunyai latar belakang pendidikan yang kurang atau tanpa pendidikan sama sekali berpotensi menghadapi kesulitan dalam bersaing di dunia kerja, yang pada gilirannya bisa menyebabkan penghasilan yang kurang dan meningkatkan risiko ketimpangan sosial.

Kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat miskin, serta rendahnya upah akibat kurangnya keterampilan, semuanya berkaitan langsung dengan standar hidup yang rendah. Dari perspektif ekonomi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pertama, ketidakseimbangan dalam pemanfaatan aset yang memicu ketidakmerataan pembagian pendapatan yang akhirnya menambah masalah kemiskinan. Kedua, terdapat kesenjangan dalam tingkat SDM antar penduduk. Terakhir, kemiskinan dapat terjadi disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap investasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan multidimensional yang lebih dari sekedar terkait dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga dengan kurangnya mutu SDM dan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Pendidikan mempunyai posisi krusial dalam memperbaiki mutu SDM. Alokasi dana untuk pendidikan memperkuat kapasitas produktif seseorang sehingga memperbesar peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai modal manusia yang esensial untuk mendorong peningkatan ekonomi dan alleviasi kemiskinan.

Gambar 1.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2009-2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut **Gambar 2.1**, persentase partisipasi kasar untuk pendidikan dasar di Provinsi Banten selalu lebih dari 100%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa sekolah dasar telah memperoleh akses pendidikan. Pada tingkat SD, terdapat peningkatan APK yang konsisten dari tahun 2009 hingga 2015. Meski demikian, tahun 2016 mengalami penurunan yang tajam, dengan APK SD turun signifikan ke angka 69,7. Setelah penurunan tersebut, APK kembali mengalami kenaikan dan menunjukkan kecenderungan stabil hingga tahun 2023.

Pada jenjang SMP, tren partisipasi pendidikan lebih stabil dibandingkan dengan SD. APK SMP mengalami peningkatan bertahap dari tahun 2009 hingga 2015. Meskipun terjadi penurunan kecil pada tahun 2016, penurunan ini tidak terlalu signifikan. Setelah itu, APK SMP kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai 95,7 pada tahun 2023. Sementara itu, meskipun APK untuk jenjang SMA lebih rendah dibandingkan dengan SD dan SMP, data menunjukkan

tren kenaikan yang terus berlanjut dari tahun 2009 hingga 2023. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2016, angka partisipasi pendidikan SMA kembali menunjukkan pertumbuhan yang stabil hingga mencapai 75 pada tahun 2023. Dalam totalitas, data ini memperlihatkan adanya kemajuan yang baik dalam partisipasi pembelajaran di Provinsi Banten, terutama pada jenjang SMP dan SMA, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di tahun-tahun tertentu.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan APK di Provinsi Banten antara lain melalui pemberian beasiswa, pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil, serta peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan jenjang pendidikan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pendidikan dapat dijangkau di suatu negara atau wilayah. Melalui indikator APK, pemerintah dapat menilai kebijakan pendidikan yang ada dan merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas serta peluang akses pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah pusat mengakui urgensi pemberantasan kemiskinan dalam meningkatkan layanan kesehatan, sehingga telah meluncurkan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah Program Jamkesmas yang bertujuan supaya cakupan kesejahteraan jasmani merata dan mengurangi beban finansial bagi kelompok masyarakat sensitif (Anindya et al., 2020). Di samping itu, pemerintah juga menekankan pembangunan infrastruktur, perekrutan dan pelatihan tenaga kondisi fisik yang profesional, serta pelaksanaan pembelajaran layanan medis agar memperluas kemudahan dan mutu layanan kesehatan (Handayani et al., 2015).

Pemerintah, baik di level daerah maupun pusat telah berusaha menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, masalah kemiskinan masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Program dan kebijakan yang ada belum memberikan dampak yang signifikan. Masih terdapat perbedaan antara perencanaan serta target yang ingin dicapai dalam upaya pengurangan kemiskinan. Penurunan jumlah penduduk miskin biasanya menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi kenyataan bahwa kemiskinan tetap menjadi masalah yang sulit dihindari.

Perundang-undangan Tahun 2004 Nomor 40 mengatur jaminan kesejahteraan termasuk dalam kebijakan perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk menyediakan jaminan agar semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan kehidupan yang bermartabat. Pada kerangka pembangunan ekonomi, pemerintah bertanggung jawab melaksanakan intervensi negara dalam bentuk program-program perlindungan sosial yang bertujuan memperkuat kapasitas rumah tangga masyarakat dalam menghadapi beragam risiko kehidupan.

Program-program tersebut dirancang untuk menjamin akses individu terhadap pemenuhan kebutuhan pokok, seperti bantuan kebugaran, ilmu pengetahuan, dan perlindungan perekonomian, sehingga mendukung distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dengan adanya jaminan sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih resilien dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, baik dalam situasi darurat maupun dalam keseharian mereka (Herlina et al., 2020; Masitoh Sirait, 2020; Zakwani et al., 2020).

Kebijakan perlindungan masyarakat ditetapkan oleh otoritas pemerintah berdasarkan kondisi fiskal yang tersedia. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk

mengawasi sumber daya secara cermat agar pelaksanaan program berjalan efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat mengandalkan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat merupakan salah satu tujuan utama jaminan sosial. Selain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial juga berperan dalam menyediakan kesempatan bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini bertujuan agar setiap orang memiliki peluang untuk berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial yang efektif, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan secara menyeluruh (Atikah Dwi Ramadhani, 2022; Santifa & Harahap, 2020; Simbolon et al., 2020).

Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi beragam tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai langkah telah dilakukan, bermula dari menyediakan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, menyelenggarakan pelatihan bagi pelajar dan mahasiswa, serta meluncurkan berbagai program bantuan seperti KIP, PIP, BLT, BOS, dan Beasiswa Afirmasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Meskipun beragam inisiatif tersebut telah dilakukan, hingga saat ini efektivitas dan keberhasilan yang diharapkan dari kebijakan-kebijakan tersebut masih belum tercapai secara maksimal.

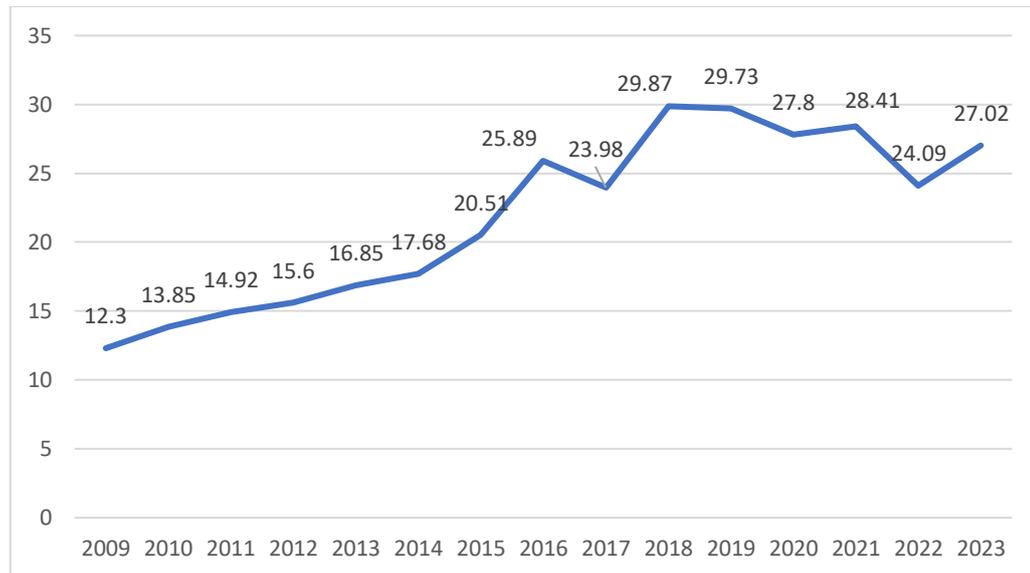
Dengan perkembangan teknologi, saat ini Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersedia dalam bentuk digital dan dapat diperoleh melalui sekolah dengan KIP merupakan program bantuan sosial yang digagas pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Program ini memberikan

bantuan dana kepada siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengurangi tanggungan biaya pendidikan.

Memahami pengaruh ketimpangan sosial kepada mutu layanan kesehatan sangat esensial agar mempercepat penyaluran layanan kesehatan yang adil dan mendukung kesetaraan masyarakat. Riset ini memberikan wawasan berlandaskan data yang dapat mengarahkan strategi dan langkah untuk menekan disparitas dalam kesehatan. Terhambatnya finansial, perbedaan lokasi spasial, tingkat pemahaman pendidikan dan kesehatan, serta aspek mental dan komunitas aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam mengeksplorasi pengaruh ketimpangan sosial kepada mutu layanan kondisi fisik. Melalui penanganan faktor-faktor tersebut, struktur layanan kesehatan bisa mengupayakan menyediakan pelayanan yang setara dan mudah dijangkau oleh semua orang, terlepas dari status sosial mereka.

Kesehatan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena kesehatan yang kurang baik dapat menurunkan produktivitas pekerja serta menambah pengeluaran kesehatan, sebagaimana akhirnya mengurangi kapasitas ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, pembenahan layanan kesehatan serta penambahan sarana masuk terhadap fasilitas kesehatan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

Gambar 1.3
Tingkat Kesehatan Penduduk Banten Tahun 2009-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan **Gambar 3.1**, bisa terpampang jenjang kesehatan masyarakat di Provinsi Banten sepanjang periode 2009-2023. Secara umum, tingkat kesehatan di Provinsi Banten dalam 15 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun ada beberapa fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas kesehatan, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat tampaknya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kesehatan penduduk di Provinsi Banten.

Data ini memberikan wawasan tentang dinamika tingkat kesehatan publik di Banten yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kebijakan pemerintah dalam sektor kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, serta situasi masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tingkat kesehatan

ini dan bagaimana intervensi kebijakan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Kebijakan yang diterapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengenai pembiayaan gratis untuk masyarakat miskin melalui program Jamkesmas merupakan kebijakan yang seharusnya mendapatkan dukungan. Namun, di lapangan, ada beberapa kasus yang menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran. Contohnya, ada keluarga yang tinggal di rumah berlantai keramik, memiliki listrik, telepon, dan sepeda motor, namun justru menerima program Jamkesmas. Sementara itu, keluarga yang lebih miskin justru tidak memperoleh bantuan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah menganggap ketidakmerataan distribusi dan banyaknya kasus salah sasaran ini sebagai hal yang wajar dan bisa dimaklumi.

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Organisasi Jaminan Sosial adalah inisiatif strategis pada penguatan program jaminan sosial nasional. BPJS berperan sebagai institusi pengelola dan pelaksana kebijakan skema perlindungan kesejahteraan menekankan etika insani, keuntungan, dan kesetaraan masyarakat yang dirancang untuk semua WNI (Hia et al., 2021).

Skema Jaminan Sosial Nasional merupakan sebuah Struktur yang mengatur implementasi beragam program jaminan sosial yang dijalankan oleh berbagai lembaga penyelenggara. Sistem ini didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yakni prinsip kemanusiaan, prinsip efektivitas kegunaan, serta asas keadilan sosial yang diterapkan untuk semua penduduk Indonesia. Prinsip kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu dan memberikan perlindungan pada mereka dalam kondisi yang berisiko. Prinsip faedah mengharuskan supaya kebijakan program kesejahteraan menyajikan hasil

yang nyata bagi pesertanya, dalam waktu singkat prinsip keseimbangan masyarakat menetapkan bahwasanya akses kepada skema ini tersebar menyeluruh tanpa adanya perbedaan (Apriani et al., 2022; Khairati et al., 2023).

Kemudian, UU tersebut menetapkan bahwasanya BPJS mencakup atas dua entitas awal, yang adalah BPJS kondisi fisik dan BPJS tenaga kerja. BPJS kondisi fisik memiliki peran untuk mengadakan rencana kesehatan yang memuat ada banyak jenis pelayanan kesehatan bagi peserta. Program ini mempunyai posisi krusial dalam mengonfirmasi akses masyarakat kepada pemberdayaan kesehatan yang unggul dan layak secara merata (Noerjoedianto & Subandi, 2022; Pradinata, 2023).

Untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan, pemerintah menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan dengan mengenakan pajak terhadap masyarakat berpenghasilan tinggi, yang selanjutnya dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah melalui belanja subsidi atau bantuan sosial. Melalui kebijakan ini, diharapkan tingkat kesejahteraan sosial dapat tercapai apabila utilitas marjinal dari pembayaran pajak oleh masyarakat berpenghasilan tinggi setara dengan utilitas marjinal yang diterima oleh masyarakat yang memperoleh Bantuan Sosial (Rosen & Gayer, 2014).

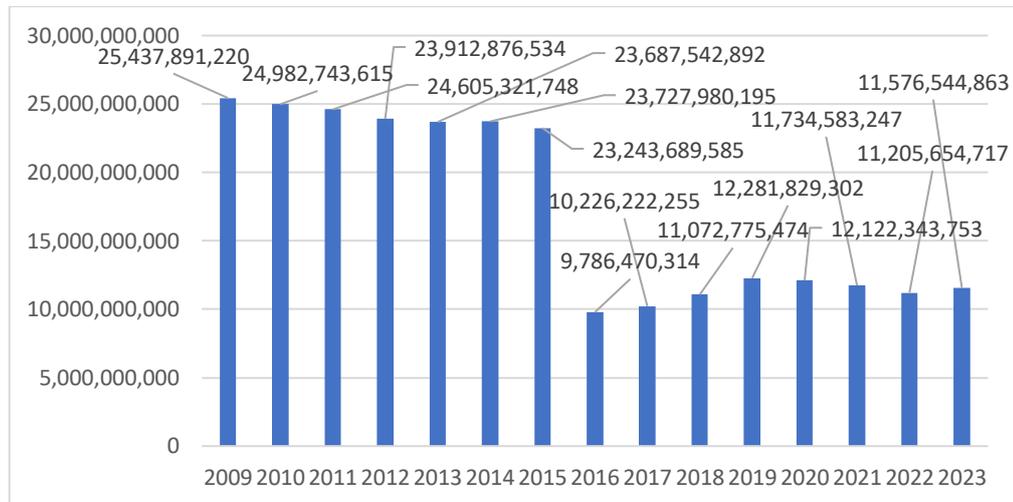
Pada hakikatnya, APBD berfungsi sebagai APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang krusial dalam mendukung perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui APBD, pemerintah daerah menetapkan estimasi pendapatan dan belanja, sekaligus menyediakan landasan bagi proses perencanaan serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Lamaya & Mei, 2021). Selain menjalankan berbagai haknya, pemerintah

juga memikul kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi kepentingan publik. Tanggung jawab ini meliputi peningkatan kualitas layanan serta pengembangan infrastruktur publik. Menurut Melati et al. (2021), Belanja pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh yang besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Terdapat sejumlah variabel kuantitatif yang digunakan untuk menilai kondisi kemiskinan dapat ditinjau dari sejauh mana keterjangkauan terhadap berbagai layanan tersedia. Hal ini meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan medis, jarak yang harus ditempuh untuk mencapai fasilitas medis, ketersediaan tempat pendidikan yang memadai, serta jumlah dana yang diperlukan masyarakat untuk menikmati layanan tersebut. Dikarenakan adanya komitmen pemerintah dalam menangani isu di bidang pendidikan dan kesehatan dengan pengalokasian anggaran yang efisien dan sesuai tujuan, diharapkan bisa menurunkan tingkat ketimpangan.

Pengeluaran pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup kelompok sosial, khususnya dalam pengentasan kesenjangan ekonomi (Riva et al., 2021). Oleh karena itu, alokasi anggaran seharusnya difokuskan pada kepentingan publik, seperti pengembangan layanan pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. Dalam tataran pemerintahan lokal, Adapun bentuk konkret dari usaha menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pelaksanaan program bantuan kesejahteraan.

Gambar 1.4
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Banten Tahun 2009-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut informasi statistik resmi dari BPS yang ditampilkan dalam **Gambar 4.1**, realisasi belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi Banten selama periode 2009 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif. Setelah tahun 2015, terdapat kecenderungan penurunan yang cukup signifikan, meskipun sejak tahun 2018 hingga 2023 terjadi sedikit peningkatan dan kondisi yang lebih stabil. Penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dalam pengelolaan program sosial, upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta dinamika ekonomi dan sosial yang turut membentuk arah prioritas belanja daerah.

Melihat berbagai persoalan diatas, pengeluaran pemerintah di Provinsi Banten memiliki dampak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa indikator, pengeluaran yang lebih fokus dan terencana di sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja sangat diperlukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks dan penggambaran isu yang sudah diuraikan sebelum ini, riset ini ditujukan untuk mendapatkan sejumlah hasil yang telah ditetapkan:

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada konteks dan isu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan topik kajian:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya hubungan kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada konteks serta pertanyaan riset yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan demikian faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Riset ini bertujuan menyediakan sumbangan signifikan dalam memperluas wawasan dan khazanah literatur di bidang ekonomi, terutama yang berfokus pada dampak pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.
2. Dalam konteks pengembangan pengetahuan, riset ini diantisipasi mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif serta menjadi sumber referensi krusial bagi penelitian-penelitian mendatang. Selain itu, hasil

penelitian ini juga bisa menjadi materi pembandingan dalam proses evaluasi dan kajian terhadap hasil-hasil studi sebelumnya.

3. Untuk penulis, temuan riset ini ditargetkan mampu memperluas wawasan, menambah pengalaman saat menyusun karya ilmiah berkualitas, serta menjadi bekal pengetahuan yang berguna dalam menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat selama era mendatang.